



Pertemuan Tahunan  
Industri Jasa Keuangan

# PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2024

Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan  
Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi  
yang Berkelanjutan

---

Jakarta, 20 Februari 2024

---



## PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN (PTIJK) 2024

### *Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*

Jakarta, 20 Februari 2024

Yang kami hormati,

Presiden Republik Indonesia – Bapak Joko Widodo,

Yang kami hormati,

- Ketua MPR RI;
- Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Gubernur Bank Indonesia dan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- Menteri Koordinator dan Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju;
- Ketua Dewan Komisioner LPS dan jajaran Dewan Komisioner LPS;
- Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Otorita IKN;
- Wakil Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK;
- Seluruh Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- Hadirin dan undangan yang berbahagia

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua**

**Om swastyastu, Namu buddhaya, Salam Kebajikan**

#### **A. PEMBUKAAN**

1. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024.
2. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Suatu kehormatan Bapak berkenan hadir dan memberikan arahan strategis bagi seluruh industri dan *stakeholders* jasa keuangan.
3. Pertemuan ini mengusung tema “**Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**”.

***Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,***

4. Kita patut bersyukur bahwa minggu lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan Umum dan Pilpres ke 5 setelah era reformasi, dengan 204,8 juta pemilih terdaftar dan *turnout* sekitar 80%, atau sekitar 164 juta pemilih, jauh lebih besar daripada jumlah pemilih Pilpres di negara manapun di dunia. **Indonesia bukan**

**lagi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi negara Demokrasi Presidensial terbesar di dunia.**

5. Selain itu, Pilpres Indonesia dilakukan secara terbuka dan langsung, dibandingkan di Amerika Serikat yang dilakukan menggunakan *electoral college* atau perwakilan per negara bagian.
6. Kita harus menggunakan hasil itu sebagai modalitas bagi pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan. Indonesia tidak lagi dalam periode *wait and see* seperti yang kerap dirasakan sebelum Pemilu. Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia dapat menjadikan momen luar biasa ini sebagai momentum *sprint* berlari cepat menuju garis *finish* yang gemilang di penghujung Presidensi Bapak Presiden dan Lembaga Legislatif periode saat ini.

## **B. ASESMEN PEREKONOMIAN GLOBAL**

***Bapak Presiden dan Bapak/Ibu yang kami banggakan,***

7. Perekonomian dunia pada tahun 2024 diawali dengan optimisme pasar bahwa berbagai langkah kebijakan yang dilakukan telah berhasil menurunkan fase perekonomian dunia dari ***unknown-unknown*** menuju fase ***known-unknown***. Sumber risiko dan kerentanan perekonomian global apalagi dampaknya pada awal tahun lalu masih belum teridentifikasi sehingga tidak berlebihan apabila tahun 2023 perekonomian dunia diperkirakan dapat dilanda "*The Perfect Storm*". Namun saat ini pasar menilai bahwa sumber risiko dan kerentanan telah teridentifikasi meski dampaknya masih belum sepenuhnya terprediksi.
8. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, kita melihat bagaimana kebijakan moneter restriktif yang diterapkan bank-bank sentral global, penghentian/ pengurangan kebijakan fiskal akomodatif, serta mulai teratasinya permasalahan rantai pasok, khususnya terkait energi, telah berhasil menurunkan tingginya inflasi yang menjadi permasalahan sentral perekonomian dunia setelah pandemi. Hal tersebut, ditambah dengan resiliensi dari beberapa perekonomian utama dunia seperti Amerika Serikat telah menurunkan kekhawatiran terhadap prospek resesi global di tahun 2024. Namun demikian, kita harus tetap mewaspadaai berbagai ***downside risk*** yang diperkirakan masih akan mewarnai proses pemulihan perekonomian global di tahun 2024.
9. Dampak dari kebijakan moneter maupun fiskal yang telah diambil sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menimbulkan risiko tersendiri terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global ke depan. Kebijakan moneter yang diperkirakan relatif tetap restriktif dalam jangka pendek untuk mengendalikan inflasi, berpotensi menyebabkan tingginya biaya pendanaan, menekan *supply* kredit maupun tingkat investasi yang diperlukan dalam proses pemulihan ekonomi. Di samping itu, pengaruh penghentian/pengurangan berbagai dukungan kebijakan fiskal terhadap sisi permintaan akan menimbulkan komplikasi tersendiri maupun divergensi terhadap pola pertumbuhan perekonomian global, yang secara keseluruhan diproyeksikan akan berjalan lambat di tahun 2024. Prospek perlambatan ekonomi global, termasuk yang berasal dari ekonomi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, perlu dicermati secara khusus pengaruhnya terhadap proses pemulihan ekonomi domestik.

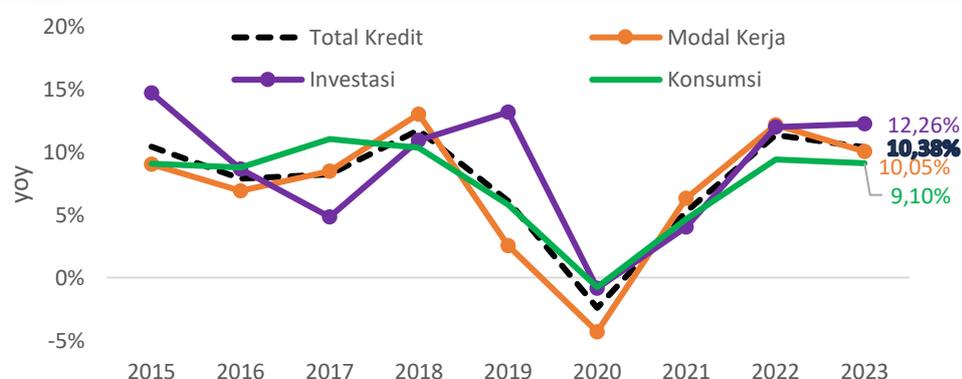
10. Sementara itu, berlanjutnya konflik di Timur Tengah, meningkatnya kebijakan perdagangan global yang restriktif dan terfragmentasi, serta tingginya ketidakpastian konstelasi kebijakan politik global sebagai dampak dari pemilu yang akan diselenggarakan di hampir 50% populasi di dunia, menjadikan risiko geopolitik sebagai **unknown variable** terhadap proses pemulihan perekonomian global.

### C. KONDISI PEREKONOMIAN & SEKTOR JASA KEUANGAN (SJK) INDONESIA

#### Bapak Presiden dan Bapak/Ibu yang saya banggakan,

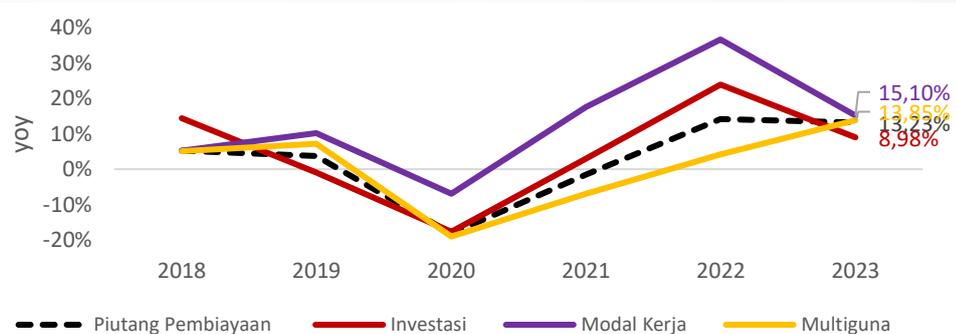
11. Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2023 secara keseluruhan terjaga baik dengan pertumbuhan dapat dipertahankan di kisaran 5%.
12. Meskipun pemulihan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara *peers*, perekonomian masih mengalami *scarring* dari pandemi dimana Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih di bawah tren pra-pandeminya. Oleh karenanya, ruang akselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbuka.
13. Sejalan dengan positifnya kinerja perekonomian, sektor jasa keuangan 2023 tetap tumbuh positif, yang ditopang oleh struktur permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
14. Dari aspek **intermediasi**, kredit dan piutang pembiayaan tumbuh *double digit* di atas posisi sebelum pandemi, yaitu masing-masing 10,38% dan 13,23%. Risiko kredit/pembiayaan yang relatif terkendali tercermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL) gross* perbankan 2,19% dan rasio *Non Performing Financing (NPF) Perusahaan Pembiayaan* 2,44%. Sementara, penghimpunan dana di pasar modal berhasil melampaui target di atas Rp200 triliun, dengan jumlah emiten baru mencetak rekor tertinggi dibandingkan negara kawasan. Minat berinvestasi di pasar modal juga terus tumbuh, dengan jumlah investor bertumbuh 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Di industri asuransi, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh masing-masing sebesar 23,90% dan 10,12%. Namun, premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi 7,99%, menunjukkan reformasi di bidang perasuransian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat perlu terus didorong dan dipercepat.

Grafik 1. Kredit Perbankan



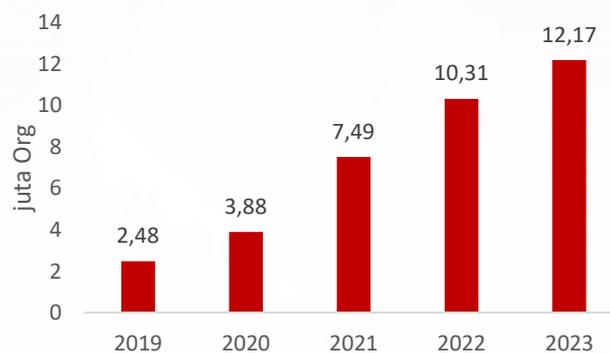
Sumber: OJK

### Grafik 2. Piutang Pembiayaan



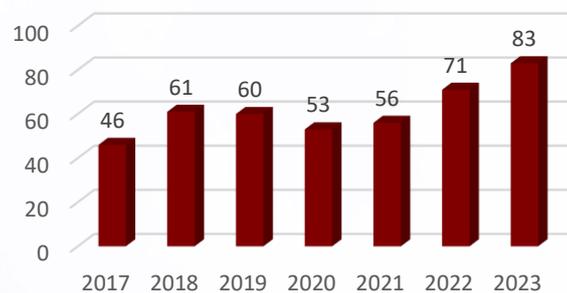
Sumber: OJK

### Grafik 3. Jumlah Investor



Sumber: OJK, KSEI

### Grafik 4. Jumlah Emiten Baru



Sumber: OJK

**Grafik 5. Penghimpunan Dana Pasar Modal**



Sumber: OJK

15. Di sisi lain, di tengah normalisasi kebijakan moneter yang terus berlanjut serta tekanan arus investasi, **likuiditas** sektor jasa keuangan terjaga, berada di atas ambang ketentuan, tercermin dari rasio Alat Likuid/*Non Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang masing-masing sebesar 127,07% dan 28,73%. Namun, pengaruh normalisasi kebijakan moneter terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) telah terlihat dengan pertumbuhan yang termoderasi.

**Grafik 6. Likuiditas Perbankan**



Sumber: OJK

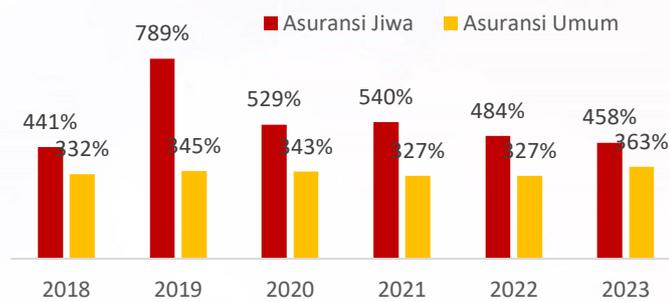
16. **Solvabilitas** industri jasa keuangan juga terpantau solid, baik di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan maupun asuransi dan dana pensiun. Bahkan sektor perbankan mencatat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 27,65, di atas beberapa negara G-20 dan negara kawasan (Thailand 20,12%, Malaysia 18,06%, dan Singapura 16,36%). Di industri asuransi, secara agregat *Risk Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa memadai di atas *threshold* yaitu masing-masing sebesar 363,10% dan 457,98%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan 2,26 kali, jauh di bawah *threshold* sebesar 10 kali.

**Grafik 7. CAR Kawasan**



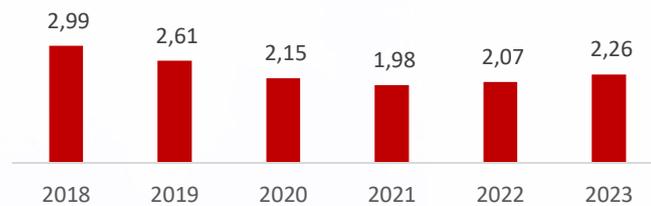
Sumber: OJK, CEIC

**Grafik 8. RBC Asuransi**



Sumber: OJK

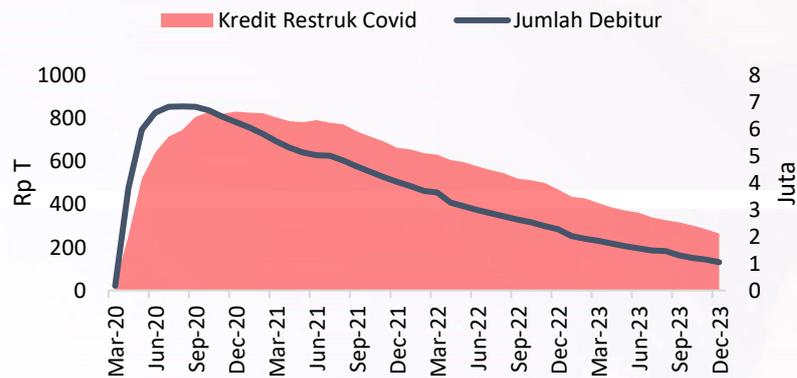
**Grafik 9. Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan**



Sumber: OJK

17. Kredit restrukturisasi Covid-19 terus turun menjadi Rp265,78 triliun dari titik tertingginya sebesar Rp830 triliun, mencerminkan sektor riil sudah bangkit. Kami yakin transisi menuju normalisasi akan berjalan baik, didukung dengan kecukupan pencadangan yang telah dibentuk perbankan selama ini mencapai 30% dari *outstanding* kredit restrukturisasi Covid-19.

**Grafik 10. Restrukturisasi Kredit Covid-19**



Sumber: OJK

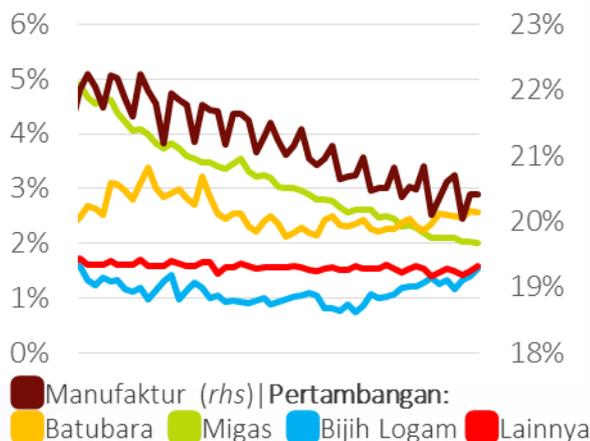
- Kinerja lembaga jasa keuangan yang kuat, didukung stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga dan semakin kondusif di atas, merupakan hasil dari kerja keras para pelaku industri jasa keuangan, serta sinergi dan kolaborasi yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

**D. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS OJK 2024**

**Bapak Presiden dan hadirin sekalian,**

- Di tengah capaian dan optimisme di atas, kami menyadari bahwa ruang pertumbuhan sektor jasa keuangan Indonesia masih cukup besar mengingat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan negara *peers*, baik di ASEAN maupun Asia.
- Bonus demografi yang kita nikmati saat ini akan menjadi keunggulan perekonomian nasional apabila tenaga kerja dapat terserap ke sektor-sektor produktif, seperti manufaktur dan lapangan kerja formal lainnya. Untuk itu, diperlukan reformasi struktural melalui upaya revitalisasi industri.

**Grafik 11. Porsi Sektor Terhadap PDB**



Sumber: BPS, CEIC

21. Kami juga mencatat bahwa perbedaan tingkat kemajuan perekonomian suatu bangsa termasuk kedalaman di sektor keuangan pada akhirnya akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga reformasi struktural lainnya. Untuk itu, OJK menaruh perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas SDM di sektor keuangan sekaligus memperkuat integritas sektor jasa keuangan.
22. Revitalisasi industri, pengembangan kualitas SDM dan reformasi struktural lainnya yang didukung oleh sektor keuangan secara optimal dapat menjadi salah satu jawaban agar kita dapat menghindari *middle income trap* dan mencapai cita-cita kita bersama untuk menjadi negara maju di tahun 2045.

**Bapak Presiden dan hadirin sekalian,**

23. Dalam jangka pendek, penurunan pertumbuhan global dan tren penurunan harga komoditas membawa tantangan tersendiri bagi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, serta menuntut sinergi, inovasi, dan kreativitas kita bersama dalam penciptaan sumber pertumbuhan baru dan juga membuka alternatif sumber pembiayaannya.
24. Hal dimaksud, diiringi dengan relatif persistennya risiko yang dihadapi pasar keuangan Indonesia ke depan, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas, mengharuskan dilakukannya penguatan struktural di pasar keuangan domestik, baik dari aspek ketersediaan jumlah dan variasi instrumen keuangan maupun aspek efisiensi serta integritas pasar.
25. Selain itu, dinamika yang tinggi di perekonomian dan sektor jasa keuangan menciptakan kebutuhan baru seperti aktivitas ekonomi yang lebih bernilai tambah, berkelanjutan dan baru, yang untuk memenuhinya memerlukan transformasi perekonomian dan sektor jasa keuangan.
26. Berbagai perkembangan dan tantangan tersebut di atas menjadi pertimbangan kami dalam menyusun prioritas dan arah kebijakan OJK ke depan. Selain itu, kami juga telah berkomunikasi secara intensif dengan industri untuk menjaring masukan dan harapan terkait kebijakan kami di tahun 2024 ini.
27. **Ke depan, untuk menavigasi sektor jasa keuangan** agar tetap *resilient* sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, OJK telah menetapkan serangkaian kebijakan prioritas.



28. Kebijakan prioritas **pertama** dilakukan melalui **penguatan sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi**.
29. Sektor jasa keuangan saat ini semakin **kompleks dan saling terkait (*interconnected*)**, mengakibatkan **potensi kerawanan yang semakin tinggi bagi stabilitas sistem keuangan**. Hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko yang mampu mengamplifikasi apabila terjadi gejala di sektor keuangan.
30. Untuk itu, kami **membangun infrastruktur pengaturan dan pengawasan terintegrasi, termasuk untuk konglomerasi keuangan**, sehingga dapat **memitigasi transmisi risiko lintas sektor**, dan meminimalisir *regulatory arbitrage*. Namun, **dibutuhkan sinergi dan dukungan** dari Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memperkuat pengawasan konglomerasi keuangan utamanya **terkait kebijakan perpajakan** sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
31. Mencermati **kebutuhan atas percepatan dan penyederhanaan** proses perizinan, utamanya terkait **dual licensing dan pelaporan**, OJK bersama dengan otoritas terkait **memperluas cakupan perizinan terintegrasi (*single window licensing*)**, proses **perizinan produk keuangan** dan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih cepat, serta **membangun arsitektur pelaporan dan database sektor jasa keuangan terintegrasi**.

**Grafik 12. Jumlah Perizinan (SPRINT)**

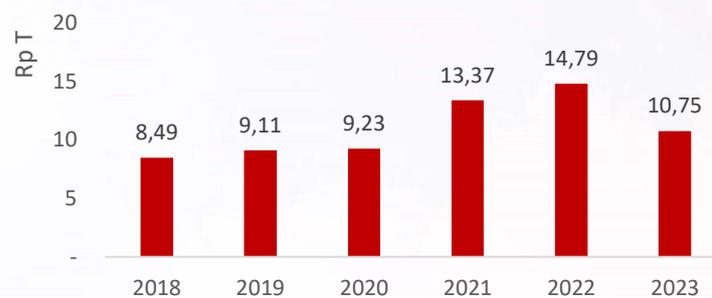


Sumber: OJK

32. Di sisi lain, dilakukan **penguatan aspek kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan *early intervention***. Kebijakan mendukung konsolidasi dan sinergi antar lembaga jasa keuangan kami lanjutkan untuk meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan, sehingga pada gilirannya turut memberikan daya dukung bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
33. **Kebijakan prioritas yang kedua, adalah peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan**.
34. **Peluang sektor jasa keuangan dalam meningkatkan perannya** sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi **masih terbuka luas**, didukung dengan upaya progresif mentransformasi sektor jasa keuangan pasca diterbitkannya UU P2SK.

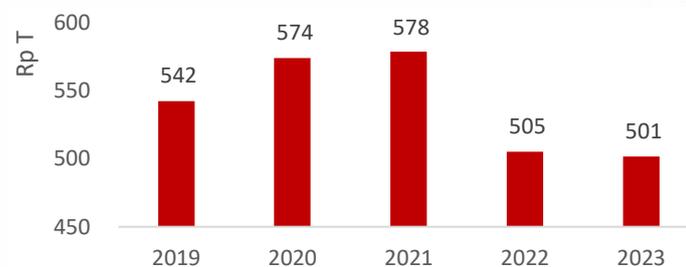
35. OJK melakukan **pengembangan sektor jasa keuangan melalui inisiatif pendalaman pasar keuangan** yang berorientasi pada peningkatan likuiditas dan daya saing. Inisiatif penyediaan *liquidity provider* saham dan penyempurnaan aturan transaksi marjin, kami lakukan untuk meningkatkan likuiditas dan nilai transaksi di pasar saham. Selain itu, untuk menumbuhkembangkan industri reksa dana dan dana pensiun, OJK memperluas penyelenggaraan dana pensiun oleh Manajer Investasi. Kami juga mendorong Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) berkinerja baik agar *go public* untuk mengembangkan bisnisnya.

**Grafik 13. Rata-rata Transaksi Saham**



Sumber: IDX

**Grafik 14. NAB Reksadana**



Sumber: OJK

36. Untuk menyiapkan **fondasi infrastruktur pengaturan, pengembangan dan pengawasan instrumen derivatif keuangan dan aset keuangan digital termasuk aset kripto**, OJK mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan, serta peta jalan 2024 – 2028, dengan berprinsip pada **pengaturan dan pengawasan yang berdaya guna, seimbang, dan kolaboratif**. Dengan demikian, inovasi teknologi sektor keuangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.
37. OJK juga secara konsisten mengoptimalkan dukungan sektor jasa keuangan untuk menjadi penggerak roda perekonomian terutama dalam **menghadapi revitalisasi industri serta menyediakan pembiayaan bagi industri bernilai tambah, sumber pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan**.
38. Kami akan **mempercepat perluasan dan kemudahan akses keuangan bagi pelaku UMKM** dan sektor produktif, **mengoptimalkan potensi ekonomi dan akses keuangan desa** serta meningkatkan inklusi secara masif, merata dan berkelanjutan di

wilayah Kota/Kabupaten, serta menggiatkan program edukasi dan literasi keuangan termasuk kecakapan keuangan syariah.

39. Selanjutnya, penguatan terhadap **peran lembaga jasa keuangan syariah** dalam perekonomian akan **terus ditingkatkan**, antara lain melalui penguatan struktur dan daya saing industri perbankan syariah melalui konsolidasi, implementasi *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS), serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Kami harapkan dengan upaya tersebut, dapat menciptakan beberapa bank syariah dengan skala aset yang kompetitif dan industri asuransi syariah semakin kuat.
40. Dari sisi keuangan berkelanjutan, OJK akan memberikan insentif bagi surat utang yang berlandaskan keberlanjutan serta mendukung peningkatan peran sektor keuangan terhadap transisi energi dan mendorong ekosistem keuangan berkelanjutan melalui implementasi **Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)** yang diluncurkan pada hari ini.
41. Taksonomi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan kredibilitas, menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta bersifat lebih inklusif dengan mencakup pengguna Non-UMKM dan UMKM. Pada saat ini taksonomi berfokus pada pengembangan di sektor energi, khususnya terkait transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE). Di samping itu, TKBI merupakan taksonomi pertama di dunia yang mengatur perlakuan terhadap mineral kritis (*critical minerals*) dalam rangka mendukung teknologi energi bersih.
42. Dengan terbitnya TKBI ini, Indonesia telah memiliki standar klasifikasi keberlanjutan yang berkualitas tinggi yang dapat mencegah praktik *greenwashing*, *social washing* dan *impact washing*.
43. Sebagai wujud komitmen OJK dalam mendukung capaian target NZE, dalam waktu dekat kami juga akan menerbitkan panduan ***Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)*** bagi perbankan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, ketahanan model bisnis serta strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
44. Namun demikian, untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem keuangan berkelanjutan yang telah dibangun itu, dukungan kebijakan yang sejalan dari Kementerian dan Lembaga lainnya kiranya dapat segera direalisasikan tahun ini, termasuk untuk mengatasi kendala permintaan, penawaran, dan likuiditas di Bursa Karbon yang telah beroperasi dan diresmikan oleh Bapak Presiden pada September 2023 lalu.

**Bapak Presiden dan hadirin sekalian,**

45. Prioritas kebijakan **ketiga**, adalah **peningkatan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan**. OJK berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan **meningkatkan integritas sektor jasa keuangan** dengan memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen dan investor.
46. **Percepatan penyelesaian Industri Jasa Keuangan (IJK) bermasalah** termasuk upaya penegakan hukum menjadi fokus utama kami dalam menegakkan integritas sektor jasa keuangan. Jumlah pengenaan sanksi tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan di tahun 2023 meningkat.

**Tabel 1. Statistik Sanksi Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan**

| Sektor       | Total sanksi administratif |              | Pencabutan izin/pembatalan pendaftaran |           | Pembekuan izin usaha |           | Sanksi administratif berupa Denda |              | Peringatan tertulis |              | Perintah tertulis |           |
|--------------|----------------------------|--------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
|              | 2022                       | 2023         | 2022                                   | 2023      | 2022                 | 2023      | 2022                              | 2023         | 2022                | 2023         | 2022              | 2023      |
| PMDK         | 111                        | 822          | -                                      | 15        | -                    | 1         | 106                               | 702          | 5                   | 31           | -                 | 73        |
| PPDP         | 1.298                      | 1.279        | 1                                      | 9         | 7                    | 8         | 263                               | 346          | 903                 | 770          | -                 | 2         |
| PVML         | 2.515                      | 1.827        | 15                                     | 8         | 16                   | 17        | 914                               | 594          | 1.570               | 1.208        | -                 | -         |
| IAKD         | 7                          | 94           | 6                                      | 17        | -                    | -         | -                                 | -            | 1                   | 77           | -                 | -         |
| PEPK         | 235                        | 295          | -                                      | -         | -                    | -         | 85                                | 167          | 150                 | 128          | -                 | -         |
| <b>Total</b> | <b>4.166</b>               | <b>4.317</b> | <b>22</b>                              | <b>49</b> | <b>23</b>            | <b>26</b> | <b>1.368</b>                      | <b>1.809</b> | <b>2.629</b>        | <b>2.214</b> | <b>-</b>          | <b>75</b> |

Sumber: OJK

47. Sebagai perwujudan lainnya adalah penegakan integritas berpedoman pada penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan ketentuan *Anti Fraud* yang akan semakin diperkuat melalui optimalisasi **pemanfaatan database fraudster** secara terintegrasi, yang berfungsi sebagai sarana diseminasi data pelaku *fraud* di sektor jasa keuangan dan terhubung dengan proses pengawasan dan perizinan di OJK.
48. Selain itu, perlindungan terhadap investor pasar modal juga dilakukan melalui perluasan dana perlindungan pemodal serta monitoring secara ketat terhadap **kondisi pasar yang tidak biasa dan berpotensi dapat merugikan investor maupun pihak lainnya**.
49. Penguatan perlindungan konsumen yang selama ini telah berjalan melalui **pengawasan market conduct** akan diperkuat dengan penyusunan parameter **conduct risk rating**.
50. OJK juga akan semakin intensif mendorong **upaya preventif** dengan **menggiatkan edukasi** untuk memperdalam pemahaman masyarakat, terutama bagi penduduk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sehingga masyarakat semakin terlindungi dan akses keuangan semakin merata.

**Tabel 2. Literasi dan Inklusi Keuangan 2023**

| Literasi dan Inklusi Keuangan 2023               |           |          |           |        |                       |
|--|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------|
| Edukasi Keuangan bersama Mitra Aliansi Strategis | 3.065     | Kegiatan |           | 48.934 | akses modul           |
|  | 2.565.443 | peserta  | LMSKU OJK | 39.261 | kelulusan modul       |
|  | 430       | konten   |           | 515    | TPAKD di 481 Kab/Kota |
| Sikapi Uangmu                                    | 2.003.462 | viewers  | TPAKD     | 93,58% | Kab/Kota di Indonesia |

Sumber: OJK

51. Pada kesempatan ini, kami ingin mengapresiasi 15 Kementerian/Lembaga/ Institusi yang tergabung dalam wadah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (**Satgas Pasti**) yang telah bersinergi bersama OJK untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal.

**Tabel 3. Statistik Satgas Pasti**

| Entitas          | Tahun     |            |              |              |            |            |              | Jumlah       |
|------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                  | 2017      | 2018       | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       | 2023         |              |
| Investasi Ilegal | 79        | 106        | 442          | 347          | 98         | 106        | 40           | 1.218        |
| Pinjol Ilegal    | 0         | 404        | 1.493        | 1.026        | 811        | 698        | 2.248        | 6.680        |
| Gadai Ilegal     | 0         | 0          | 68           | 75           | 17         | 91         | 0            | 251          |
| <b>Total</b>     | <b>79</b> | <b>510</b> | <b>2.003</b> | <b>1.448</b> | <b>926</b> | <b>895</b> | <b>2.288</b> | <b>8.149</b> |

Sumber: OJK

52. Melengkapi langkah-langkah kebijakan tersebut, OJK akan melanjutkan transformasi internal yang terus dilakukan selama ini, baik melalui penyelarasan organisasi dan SDM, maupun akselerasi proses bisnis di OJK.
53. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan juga agar OJK mampu memberikan layanan serta kinerja yang berkualitas sebagaimana ekspektasi *stakeholders* terhadap OJK.

## **E. OUTLOOK SJK 2024**

### **Bapak Presiden dan Bpk/lbu yang berbahagia,**

54. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kami optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2024 akan berlanjut. Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 9%-11%, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 6%-8%. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar Rp200 triliun.
55. Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10%-12% sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Aset asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 4%-6% di tengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset Dana Pensiun diperkirakan juga tumbuh 10%-12% dan Aset Penjaminan diperkirakan tumbuh 9%-11%.
56. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang positif antara Pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

## **F. PENUTUP**

***Bapak Presiden dan hadirin sekalian,***

57. Demikian arah kebijakan OJK di tahun 2024 yang dapat kami sampaikan.
58. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Presiden menyampaikan arahan terkait harapan terhadap kami dan sektor jasa keuangan ke depan, agar dapat lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
59. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan memberikan ridho-Nya kepada kita semua.
60. Sebelum ditutup, izinkan **kami meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia**, sebagai persembahan OJK untuk Indonesia.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

***Om santi santi santi om***

Jakarta, 20 Februari 2024

**Mahendra Siregar**

*Ketua Dewan Komisiner OJK*